

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pemerintah menerbitkan KMK Nomor 466a/KMK.011/1978 untuk mempercepat pelunasan obligasi. Ditetapkan batas waktu 5 tahun untuk mengklaim pelunasan obligasi. Setelah lewat 5 tahun, klaim dianggap kedaluwarsa. Dalam perkara ini jaksa menyatakan bahwa terdapat Kesalahan dalam kewenangan mengadili, Tidak jelasnya kedudukan hukum penggugat, Klaim sudah kedaluwarsa berdasarkan KMK 466a/1978, Tidak lengkapnya penjelasan tentang dasar hukum dan prosedur penerbitan obligasi serta Tidak adanya penjelasan yang memadai tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan. Meski pemerintah berupaya menyelesaikan masalah obligasi lama melalui regulasi, masih muncul gugatan-gugatan hukum yang umumnya tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu kadaluwarsa dan ketidaklengkapan prosedur hukum dalam pengajuan gugatan.
2. Kendala utama yang dihadapi jaksa dalam menangani perkara obligasi ini berupa keterbatasan barang bukti, dimana bukti sudah kuno dan kesulitan untuk mencarinya, tidak ada pengaruh perubahan regulasi dalam perkara ini.

#### **4.2 Saran**

1. Berdasarkan pembelajaran dalam perkara ini, ada baiknya untuk membuat sistem pencatatan dan dokumentasi obligasi yang lebih baik. Menetapkan

prosedur yang jelas untuk penerbitan dan pelunasan obligasi. Memastikan transparansi dalam pengelolaan obligasi negara. Memperjelas regulasi terkait batas waktu klaim obligasi. Membuat aturan yang detail tentang prosedur pengajuan klaim. Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang status obligasi. Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Membuat mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan obligasi Menetapkan prosedur standar operasional yang jelas. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang obligasi. Mensosialisasikan prosedur dan batas waktu klaim. Memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban pemegang obligasi. Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum obligasi.

2. Perlu dibuat sistem pengarsipan digital yang terintegrasi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting negara. Membuat database khusus untuk dokumentasi obligasi negara. Melakukan preservasi dan digitalisasi dokumen-dokumen kuno untuk mencegah kerusakan lebih lanjut Meningkatkan kompetensi jaksa dalam menangani kasus-kasus obligasi. Mengadakan pelatihan khusus tentang pasar modal dan obligasi. Membentuk tim khusus yang menangani kasus-kasus obligasi lama. Memperkuat kerjasama dengan ahli dan akademisi di bidang keuangan dan hukum. Pencegahan Kasus Serupa serta Memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan obligasi negara.